



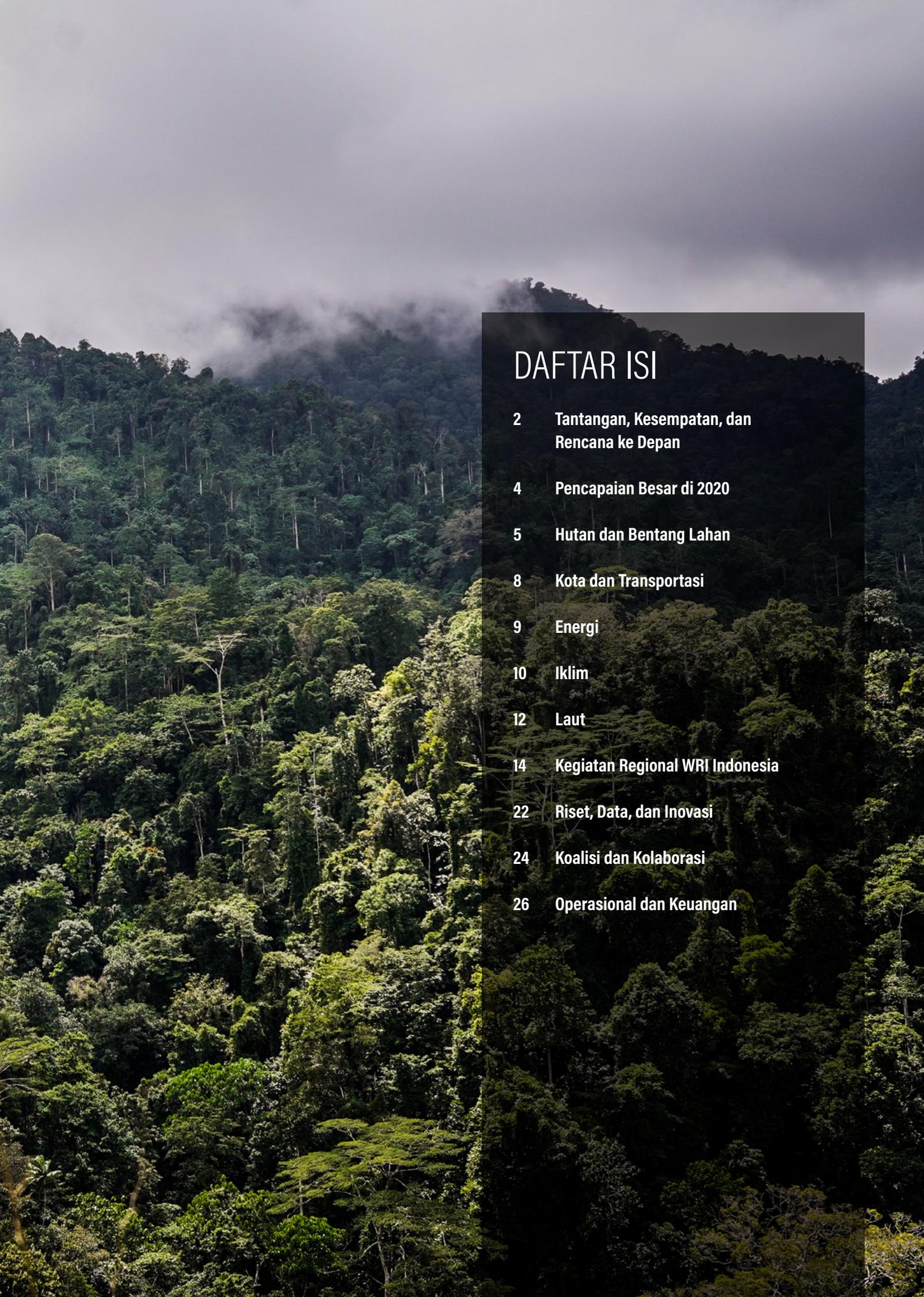
WRI INDONESIA



**LAPORAN TAHUNAN**  
**WRI INDONESIA 2020**

wri-indonesia.org





## DAFTAR ISI

- 2 **Tantangan, Kesempatan, dan Rencana ke Depan**
- 4 **Pencapaian Besar di 2020**
- 5 **Hutan dan Bentang Lahan**
- 8 **Kota dan Transportasi**
- 9 **Energi**
- 10 **Iklim**
- 12 **Laut**
- 14 **Kegiatan Regional WRI Indonesia**
- 22 **Riset, Data, dan Inovasi**
- 24 **Koalisi dan Kolaborasi**
- 26 **Operasional dan Keuangan**

# TANTANGAN, KESEMPATAN, DAN RENCANA KE DEPAN

Tidak pernah kita bayangkan bahwa satu virus kecil tak kasat mata berkode SARS-CoV-2, atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, mampu menjungkirbalikkan kehidupan sekitar tujuh miliar manusia di Bumi di awal 2020. Sampai dengan akhir 2020, lebih dari 1,8 juta orang telah meninggal dunia akibat virus ini. Walaupun pandemi ini bukanlah krisis kemanusiaan pertama yang dialami, karena kehidupan manusia di abad ini saling terhubung oleh teknologi maju, tingkat kerentanan dan kesenjangan menjadi lebih tinggi. Di Indonesia, dampak pandemi telah memengaruhi capaian pembangunan ekonomi dan sosial yang sebelumnya telah berjalan cukup baik di 2019. Berbagai kelompok masyarakat kehilangan pendapatan, mengalami pemutusan hubungan kerja dan mengalami kerawanan pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif di angka 2,07 persen. Angka kemiskinan di Maret 2020 berada di 9,78 persen, bertambah 1,63 juta orang dari September 2019. Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan berada di kisaran 4,3 – 5,3 persen.

Demi mengejar perbaikan perekonomian yang terpuruk karena pandemi, mau tidak mau pemerintah harus mengubah arah prioritas pembangunan. Akibatnya, berbagai upaya yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim, polusi udara dan air, serta deforestasi, sangat rawan dikesampingkan. Salah satu contohnya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) menjelang akhir 2020. UU CK –yang juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat (*omnibus law*) karena mencakup banyak sektor– bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mempermudah proses investasi dengan mengurangi persyaratan peraturan izin usaha dan pembebasan tanah. Namun sayangnya, terlepas dari niat baik untuk mendorong pemulihan ekonomi, implementasi UU CK berpotensi melemahkan instrumen perlindungan lingkungan hidup, semisal berkurangnya hak suara masyarakat yang terdampak akibat penerbitan izin terkait lingkungan, perubahan batas minimal kawasan hutan dan hilangnya kewajiban analisis dampak lingkungan (amdal). Kesemua ini jelas akan memengaruhi komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim pada Perjanjian Paris dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.



Pandemi COVID-19 telah membuka mata kita dan mengajarkan bahwa kita semua lebih rentan dari yang kita kira. Di saat yang sama, krisis ini membuka peluang untuk melakukan perubahan terhadap cara kita dalam menilai, mengurangi dan mengelola risiko, dan bahwa perlu ada upaya bersama yang melewati batas-batas geografis untuk mengatasi tantangan global. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh krisis ini tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun semata. Saat ini, pemerintah tengah meningkatkan bantuan dan stimulus untuk pemulihan situasi ekonomi, tetapi pengamanan yang sangat terbatas pada aspek lingkungan. Sangatlah penting untuk memastikan upaya yang dilakukan tidak memperburuk krisis lain, seperti yang diakibatkan oleh polusi udara dan krisis iklim yang sudah terjadi. Indonesia memiliki pilihan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pembangunan tinggi karbon dan “business as usual” yang tidak berkelanjutan, atau membangun kembali Indonesia yang lebih aman, lebih sejahtera, dan lebih tangguh melalui pembangunan rendah karbon dan tahan iklim.

Oleh karena itu, dalam menghadapi pandemi dan tekanan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan kepada masyarakat, WRI Indonesia mengadvokasi narasi “Build Back Better” kepada pemerintah, sektor swasta, dan publik untuk memberikan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dalam merancang dan melaksanakan pemulihan ekonomi pascapandemi. Diadopsi dari pemulihan pascabencana, *Build Back Better*

bertujuan untuk menghindari terjadinya kondisi kerentanan semula dan menjadikan proses pemulihan sebagai transformasi menuju arah yang lebih baik, mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dari sisi internal, situasi pandemi yang masih akan berlanjut ini telah berdampak secara signifikan pada kegiatan operasional kantor, termasuk cara kerja dan lingkungan sekitar WRI Indonesia. Terhitung sejak Maret 2020, staf WRI Indonesia sudah menjalankan kerja jarak jauh (*work from home*) dan kami juga telah melaksanakan berbagai penyesuaian dengan kehidupan normal baru. Terlepas dari semua hal ini, berbagai pencapaian di 2020 adalah hasil kerja keras staf WRI Indonesia yang tetap bekerja secara profesional dalam segala keterbatasan yang mereka hadapi.

Laporan Tahunan 2020 ini menyajikan berbagai kegiatan utama yang kami laksanakan sepanjang tahun 2020 dalam rangka pencapaian pembangunan Indonesia yang rendah karbon. Kami meyakini bahwa untuk mencapai tujuan ini, WRI Indonesia perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta. Secara khusus, kami berterima kasih kepada para mitra dan donor, yang tanpa dukungan dari mereka, belum tentu segala kegiatan yang disampaikan dalam laporan ini dapat terlaksana.

Kami juga mengajak Anda, para pembaca yang baru mengenal WRI Indonesia, untuk mencermati kegiatan-kegiatan kami, berbagi ide dan saran, serta bergabung dalam komunitas kami.

Terima kasih dan salam hangat,

**Dewan Pembina dan Staf WRI Indonesia**

# PENCAPAIAN BESAR DI 2020

## PELUNCURAN SERTIFIKAT ENERGI TERBARUKAN BERSAMA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Di awal 2020, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan WRI Indonesia, yang merupakan bagian dari *Clean Energy Investment Accelerator* (CEIA) Indonesia, bersepakat untuk mengembangkan berbagai inovasi produk energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu perkembangan penggunaan energi baru terbarukan oleh seluruh pelanggan PLN, termasuk sektor industri. Melalui kerja sama ini CEIA mendukung PLN untuk melakukan studi dan penelitian terkait sertifikasi energi terbarukan (*renewable energy certificate/REC*) yang sesuai dengan kondisi ketenagalistrikan di Indonesia. REC merupakan instrumen berbasis pasar yang menyatakan bahwa pemegang sertifikat menggunakan satuan MWh (megawatt jam) listrik dari sumber-sumber EBT. REC diterbitkan berdasarkan produksi energi listrik dan pembangkit terbarukan berstandar internasional (I-REC).

Sejauh ini, PLN telah berperan aktif dalam gerakan global pengurangan emisi karbon dengan mengoptimalkan penggunaan pembangkit EBT. Sampai dengan Desember 2019, PLN telah mengoperasikan pembangkit EBT sebesar 7.681 MW. PLN akan terus mendorong penggunaan EBT hingga lebih dari 15.000 MW pada tahun 2028.

Pada November 2020, melalui inisiatif CEIA, WRI Indonesia telah berhasil mendukung PLN dalam pembuatan dan peluncuran REC yang pertama di Indonesia. Hal ini semakin membuka berbagai peluang dan pilihan bagi para pelaku sektor komersial dan industri untuk mendapatkan energi bersih bagi kegiatan operasional mereka. Bagi pelanggan PLN, REC dapat menjadi salah satu instrumen pengadaan untuk memenuhi target penggunaan EBT yang transparan. Ke depan, keberadaan REC diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar nasional EBT di Indonesia.

“Penerbitan REC diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembangkit EBT untuk memenuhi target bauran nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025, serta sebagai tanggung jawab PLN untuk menyediakan listrik bagi generasi saat ini dan mendatang. Komitmen ini hadir dalam semangat yang kami sebut sebagai Power Beyond Generations.”

- Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN

CEIA Indonesia merupakan koalisi antara sektor publik dan swasta yang diinisiasi oleh Allotrope Partners, World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan National Renewable Energy Laboratory (NREL) Amerika Serikat untuk mendorong pengembangan energi bersih di Indonesia. CEIA juga menggunakan cara-cara inovatif untuk mengatasi hambatan terkait skala penyebaran energi bersih di Kolombia, Vietnam, Filipina dan Meksiko.

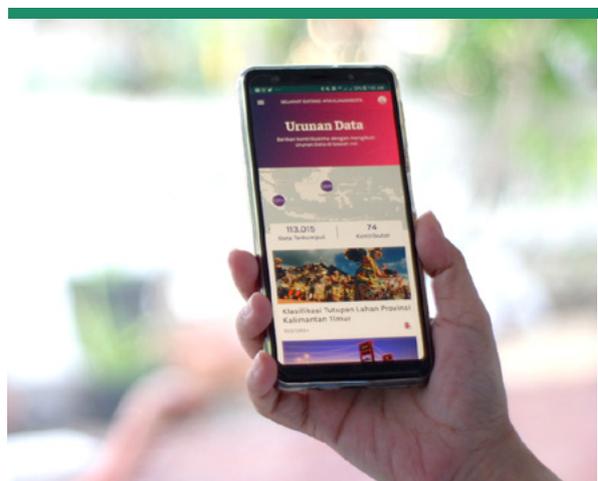
# HUTAN DAN BENTANG LAHAN

*WRI Indonesia berupaya mewujudkan hutan yang sehat dan dikelola secara berkelanjutan, yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara keanekaragaman hayati. Secara khusus, WRI Indonesia berupaya melestarikan hutan yang ada dan memulihkan hutan dan lahan yang terdegradasi.*

## ■ **Monitoring Hutan dan Penggunaan Lahan**

- Peluncuran sistem pemantauan deforestasi berbasis teknologi radar. Koalisi perusahaan di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, kini menggunakan sistem pemantauan deforestasi terbaru WRI untuk memastikan rantai pasok kelapa sawit sebelas perusahaan yang tergabung dalam koalisi ini bebas dari deforestasi.
- Pemerintah Provinsi Aceh mengadopsi sistem pemantauan pembalakan liar yang dikembangkan WRI Indonesia. Metodologi “places-to-watch” menggunakan teknologi satelit dan *custom filtering* telah secara resmi digunakan oleh Taman Nasional Gunung Leuser dan Unit Pengelolaan Hutan V, melengkapi mereka dengan sistem mutakhir dalam memantau salah satu ekosistem terpenting di Sumatra.
- Pemerintah mengadopsi Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut (PRIMS Gambut) yang kini telah dilengkapi dengan sistem peringkat bahaya kebakaran untuk lebih memaksimalkan mitigasi kebakaran lahan gambut.
- Konsorsium RESTORE+, yang terdiri dari WRI Indonesia, Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), World Agroforestry Center (ICRAF), dan WWF Indonesia mendukung upaya restorasi hutan dan lahan di

Indonesia melalui penyediaan data yang lengkap dan kredibel dari lapangan untuk membantu proses pembuatan kebijakan terkait restorasi hutan dan lahan terdegradasi di Indonesia. Data tersebut dikumpulkan secara inklusif melalui aplikasi seluler Urundata. Hingga 2020, pada kampanye tahap pertama yang memfokuskan pada identifikasi perubahan tutupan lahan, Urundata telah melakukan 21 kegiatan kampanye dan membangun kerja sama dengan 50 universitas di Indonesia, memiliki 1.058 kontributor, serta 4.410.415 kontribusi data. Di November 2020, Jelajah Nusantara (Jelantara) untuk Sumatra Selatan diluncurkan. Jelantara merupakan kegiatan pengambilan data secara urun daya untuk mengidentifikasi potensi restorasi lahan. Kegiatan Jelantara untuk Kalimantan Timur akan diluncurkan di awal 2021.



## ■ Kebijakan Satu Peta

- Mendukung operasionalisasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan (Simojang), sebuah platform yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memonitor geoportal dan mengevaluasi kelengkapan kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, dan standar pada simpul jaringan di pemerintah pusat dan daerah. Serta membantu penilaian Bhumandala Award 2020 (Penghargaan Penyelenggaraan Simpul Jaringan) secara daring pada masa pandemi.
- Mendukung pembaruan aplikasi PetaKita yang diprakarsai BIG untuk kegiatan pemetaan partisipatif di daerah.
- Mendukung pemetaan partisipatif desa yang dilaksanakan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata berkolaborasi dengan BIG, Universitas Riau dan pemerintah daerah di Kabupaten Kampar, serta Universitas Sriwijaya dan pemerintah daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dengan yang menghasilkan data spasial tematik desa dan modul pemetaan partisipatif.
- Mendukung Pemerintah Provinsi Riau dalam koordinasi dan pelatihan terkait Implementasi Kebijakan Satu Peta Informasi Geospasial Tematik Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (ILOK dan IUP), sebagai bagian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Stranas

PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, Lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

## ■ Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

- Mendukung pengembangan protokol resolusi konflik tenurial yang disusun oleh tim Wakil Menteri ATR/BPN serta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sebagai langkah awal pengembangan Sistem Informasi Konflik Tenurial.
- Bersama Samdhana Institute, mendukung Kantor Staf Presiden (KSP) dalam menyusun Kertas Kebijakan tentang percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Indonesia. Kertas Kerja tersebut berisi rekomendasi upaya penanganan konflik tenurial, pengakuan masyarakat adat, percepatan penetapan perhutanan sosial, reforma agraria, pengelolaan sawit masyarakat serta kaitannya dengan UU Cipta Kerja.
- Menyelesaikan enam Rencana Pengelolaan Hutan Adat (RPHA) dan tiga Rencana Pengembangan Bisnis berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta jasa ekosistem di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Selatan yang merupakan bagian dari implementasi pengelolaan hutan dan lahan pasca pengakuan Hutan Adat.



- Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Sarmi, WWF Indonesia, Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, serta Universitas Cendrawasih, mengusulkan skema hutan adat di Kabupaten Sarmi.
- Mendukung pengembangan program agroforestri di Hutan Desa Tandun, Riau sebagai salah satu contoh implementasi resolusi konflik dan upaya restorasi lahan dari sawit menjadi hutan kembali.
- Bersama Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, mendukung Dinas Kehutanan Sumatra Selatan dalam pengembangan basis data dan Sistem Informasi Perhutanan Sosial (SIPS), sebagai alat bantu dalam pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perhutanan sosial di Sumatra Selatan.

#### ■ Menerapkan Prinsip Berkelanjutan di Rantai Pasok Komoditas dan Praktik Bisnis

- Memfasilitasi perumusan strategi keterlibatan bersama yang melibatkan koalisi LSM dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk membantu perusahaan pemasok kelapa sawit skala kecil dan menengah mengadopsi komitmen bebas deforestasi dalam rantai pasoknya. Ini merupakan pengejawantahan dari peran WRI Indonesia sebagai tuan rumah Sekretariat *the Accountability Framework Initiative* di Asia Tenggara.

- Memberikan bantuan teknis kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua dalam proses peninjauan perizinan terhadap 107 perkebunan sawit. Selanjutnya akan dilakukan peninjauan aspek legalitas dan data spasial sebagai rekomendasi tindak lanjut. Salah satunya adalah mencabut izin yang tidak aktif demi menyelamatkan hutan Papua dari deforestasi di masa depan.
- Memfasilitasi sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) untuk ratusan petani kelapa sawit di Provinsi Riau.



# KOTA DAN TRANSPORTASI

*WRI Indonesia mendukung upaya untuk mewujudkan kota yang layak huni dengan menerapkan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, khususnya pada masalah air, polusi udara, dan sampah.*

## ■ Inisiatif Pengurangan dan Penyerapan Emisi (EMISI)

*EMISI adalah platform buatan Indonesia yang dapat membantu penggunaannya untuk mempelajari, memantau dan ikut serta dalam aksi iklim*

- Meluncurkan aplikasi EMISI untuk membantu individu, kelompok dan/ atau lembaga mengukur emisi karbon dan polutan yang mereka hasilkan untuk mengurangi dan mendukung penyerapan jejak karbon yang dilaksanakan oleh mitra penanam dan penumbuh pohon WRI Indonesia pada Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2020. EMISI menggunakan pendekatan berbasis sains dan teknologi untuk membantu mengubah perilaku dan gaya hidup pribadi dan organisasi dalam rangka mengurangi dampak emisi terhadap krisis iklim.
- Mitra kampanye lingkungan WRI Indonesia mengorganisir seminar daring dan urun dana yang berhasil mengumpulkan Rp330.000.000 untuk menanam dan merawat 15.000 pohon di Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, dan Jakarta, menyerap 1.500 tonCO<sub>2</sub>e selama 20 tahun ke depan.
- Memfasilitasi perusahaan transportasi daring dan membantu mereka untuk mengadopsi metode penghitungan emisi transportasi perkotaan di tingkat individu dan mengimplementasikan program penyerapan karbon melalui penanaman pohon yang didasari perjalanan individu masyarakat Indonesia.

## ■ Inisiatif Kota Mendukung Hutan (Cities4Forests)

*Cities4Forests adalah koalisi lebih dari 65 kota-kota di seluruh dunia, termasuk Jakarta, yang bertujuan untuk mengintegrasikan hutan kota, hutan sekitar kota, dan hutan yang jauh dari kota ke dalam program dan perencanaan pembangunan kota*

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetujui dan mengadopsi rekomendasi WRI Indonesia terhadap draf final peraturan gubernur tentang pohon dan peraturan gubernur tentang perancangan taman
- Menyusun peta tutupan pohon dan peta tutupan lahan secara partisipatif di Jakarta sebagai *baseline* pelaksanaan inventarisasi pohon dan bahan masukan untuk strategi pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Meningkatkan kapasitas institusional pemerintah provinsi dan mahasiswa dalam kegiatan pemetaan partisipatif peta tutupan pohon dan peta tutupan lahan tahun 2020.
- Membantu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mencapai target Kegiatan Strategis Daerah 2020 dengan mengembangkan panduan metode pelaksanaan inventarisasi pohon, pengembangan fitur platform inventarisasi pohon, serta mendukung pelaksanaan proses digitasi manual tajuk pohon di lima kecamatan.
- Menyelenggarakan webinar tentang pentingnya taman kota bersama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang dihadiri oleh komunitas dan masyarakat
- Mengampanyekan pentingnya ruang terbuka hijau bagi penduduk dan lingkungan perkotaan di media sosial Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

# ENERGI

*WRI Indonesia berupaya membantu pencapaian ketahanan energi dan target pengurangan emisi dengan mengoptimalkan potensi energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya bahan bakar fosil, sekaligus mendorong langkah-langkah efisiensi energi.*

## ■ WRI Indonesia mendukung pengadaan energi terbarukan untuk perusahaan

- Bekerja sama dengan PLN untuk meluncurkan Sertifikat Energi Terbarukan (REC) nasional pertama (lihat: Pencapaian Besar di 2020)
- Bekerja sama dengan Nike untuk proyek percontohan atap surya. Melalui koalisi CEIA, WRI Indonesia memberikan bantuan teknis untuk salah satu pemasok Nike di Indonesia terkait pengadaan vendor *solar rooftop* untuk pabrik di Indonesia. Pengalaman dari proses ini akan digunakan sebagai studi kasus untuk mendorong adopsi penggunaan EBT oleh sektor komersial dan industri di Indonesia.

## ■ WRI Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk penyusunan strategi Bali *E-mobility*

- Pengembangan gugus tugas percepatan untuk kebijakan kendaraan listrik
- Implementasi percontohan serta pengembangan kapasitas pada modul perencanaan *e-mobility* untuk pemerintah provinsi dan perusahaan swasta

## ■ WRI Indonesia mendukung strategi *green bond* untuk perusahaan energi

- Mengembangkan metode penilaian kesesuaian awal metode untuk utilitas listrik dalam mengakses pasar *green bond*
- Melakukan penilaian terhadap pasar *green bond* untuk proyek energi terbarukan di Indonesia



# IKLIM

*WRI Indonesia berupaya untuk memastikan transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui peningkatan target pengurangan emisi dan penerapan strategi iklim jangka panjang yang kuat.*

## ■ **Pembangunan Rendah Karbon Indonesia**

*WRI Indonesia mendukung pembangunan rendah karbon dengan melakukan riset dan analisis yang komprehensif, membangun kerja sama dengan para mitra di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan.*

- Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (LCDI) berhasil diintegrasikan sebagai program prioritas di Prioritas Nasional Enam “Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim” dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi salah satu indikator dalam Kerangka Ekonomi Makro RPJMN 2020-2024, setara dengan indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, rasio Gini, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia.
- Mendukung pembaruan pemodelan *system dynamics* LCDI yang telah mengintegrasikan dampak Pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan target penurunan emisi GRK.
- Mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan *Build Back Better* dan upaya meningkatkan target penurunan emisi yang lebih ambisius melalui berbagai studi, antara lain studi mengenai kehilangan dan pemborosan makanan, studi mengenai pajak karbon, penilaian dampak regulasi untuk kebijakan penetapan harga karbon, studi terkait target intensitas energi final, studi keterkaitan antara biodiversitas dan perubahan iklim, serta studi stimulus fiskal hijau.

- Mendukung upaya komunikasi kepada sejumlah *prominent persons* untuk berpartisipasi sebagai LCDI Commissioners, dalam rangka memperluas jangkauannya di tingkat nasional dan internasional. Para LCDI Commissioners di antaranya adalah M. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12), M. Chatib Basri (ekonom dan mantan Menteri Keuangan RI), Shinta Kamdani (Presiden *Indonesia Business Council for Sustainable Development*) dan Dyah Roro Esti Widya Putri (Kaukus Ekonomi Hijau; Dewan Perwakilan Rakyat RI).

## ■ **Pengukuran dan Penguatan Aksi iklim (TASCA)**

*Melalui proyek TASCA, WRI Indonesia dan Universitas Papua bekerja sama mendukung upaya implementasi pembangunan rendah karbon di Papua Barat dengan kajian permodelan, pelatihan permodelan system dynamics, serta menyusun modul khusus Papua Barat di platform *Climate Watch Indonesia*.*

- Bersama the Environment Institute dan Jejaring Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIKI), menyelenggarakan *webinar* untuk meningkatkan pemahaman mengenai ambisi iklim dan *Build Back Better*.
- Mengembangkan studi mengenai kontribusi Papua Barat untuk pencapaian *Nationally Determined Contribution* dari sektor lahan, hutan, limbah dan industri. Hasil studi tersebut juga telah disampaikan dalam *the International Symposium on Earth, Energy, Environment Science and Sustainable Development*.
- Mendukung Universitas Papua dalam penyusunan studi terkait skenario kontribusi Papua Barat untuk mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution* dengan

pendekatan *system dynamics*. Juga, mendukung peningkatan kapasitas peneliti di Universitas Papua terkait ketrampilan *system dynamics*. Lebih lanjut, WRI Indonesia bersama APIKI sedang menyusun jurnal terkait dengan skenario *build back better* Papua Barat dikaitkan dengan aksi iklim tingkat provinsi. Jurnal ini dalam proses pengajuan ke dalam Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan yang dikelola oleh Balitbang KLHK.

- Bersama lima pakar iklim, menyusun studi untuk menggali peluang penurunan GRK melalui pendekatan sektoral.

### ■ **Kemitraan untuk Meningkatkan Transparansi dan Inovasi (PaSTI)**

*PaSTI bertujuan untuk meningkatkan kerja sama inovatif antara para pemangku kepentingan demi memperkuat transparansi dalam strategi pengurangan emisi gas rumah kaca serta untuk meningkatkan aksi iklim yang ambisius di Indonesia.*

- Mengembangkan produk pengetahuan seperti kertas kerja tentang transparansi data iklim, analisis ekonomi, serta panduan untuk pelaksanaan Sistem Pelaporan Satu Pintu (*One Gate Reporting System/OGReS*)
- Kelompok kerja teknis yang terdiri dari Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, serta pelaku usaha dan ahli iklim telah menyepakati inisiasi awal dalam merancang OGReS.
- Diseminasi sejumlah produk riset kepada khalayak internasional untuk meningkatkan keterlibatan dan kontribusi komunitas internasional pada inisiatif PaSTI.
- Meluncurkan inisiatif "*Enhancing Data and Ambition Loops in Indonesia and Southeast Asia*" sebagai pendukung rekomendasi dari proyek PaSTI, yang difokuskan kepada penerapan target berbasis sains pada pelaku usaha di Indonesia dan Asia Tenggara.

### ■ **Pangan dan Tata Guna Lahan (FOLU)**

*FOLU adalah inisiatif global yang bekerja bersama para mitra guna mentransformasi sistem pangan dan tata guna lahan dunia melalui penyusunan solusi berbasis sains dan aksi bersama yang ambisius.*

- Memperbarui rancangan Agenda Aksi dengan tambahan konteks kondisi pandemi COVID-19, serta beberapa kajian pendukung lain, termasuk:
  - kajian biaya tersembunyi dari sistem pangan dan tata guna lahan saat ini;
  - kajian peluang bisnis untuk ekonomi pangan dan tata guna lahan yang baru;
  - kajian ekonomi politik sistem pangan dan tata guna lahan saat ini;
  - skenario dan kajian pasar untuk pertanian berkelanjutan di lanskap Kalimantan Timur.
- Mendukung proses penghitungan baseline nasional yang dilakukan oleh LCDI bersama Kementerian PPN/BAPPENAS dengan mengembangkan kajian sistematis dari diskusi dan metodologi kehilangan dan pemborosan makanan di Indonesia, termasuk usulan kerangka dasar dan titik panas kehilangan.
- Mendukung Komite Penasihat Ketahanan Pangan Papua Barat sebagai tindak lanjut dari kajian ketahanan pangan yang dilakukan pada fase pertama.
- Menjangkau para praktisi dan pemerhati isu kesehatan dan gizi melalui penyelenggaraan webinar "Transformasi Sistem Pangan dan Tata Guna Lahan di Indonesia untuk Pemenuhan Kebutuhan Gizi dan Kesehatan bagi Semua" bersama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan transisi menuju Fase Dua FOLU Indonesia.
- Mendukung para mitra FOLU, termasuk Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dalam penyelenggaraan webinar "*Reducing Food Loss and Waste during COVID-19*" bersama The Jakarta Post dan dengan Surplus Community dalam penyelenggaraan webinar "*A Sustainable Future for Food*" dalam rangka Hari Pangan Sedunia.
- Berkolaborasi dengan mitra dalam diskusi dan persiapan dialog independen terkait sistem pangan Indonesia untuk persiapan input organisasi masyarakat sipil terhadap masukan Indonesia untuk UN Food System Summit 2021.
- Berpartisipasi dalam dialog-dialog yang dipimpin Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/BAPPENAS, terkait sistem pangan, dengan membawa temuan dari analisis dan kajian yang telah dilakukan.

# LAUT

*WRI Indonesia berupaya mewujudkan laut yang sehat dan produktif dengan melestarikan ekosistem laut, meningkatkan produktivitas perikanan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.*

## ■ National Plastic Action Partnership (NPAP)

*NPAP adalah kolaborasi multipihak yang bertujuan untuk mengurangi 70 persen sampah plastik di lautan Indonesia pada 2025 dan bebas sampah plastik pada 2040.*

- Meluncurkan rencana aksi multipihak yang berisi rekomendasi utama dalam menangani limbah plastik di laut sekaligus mengangkat *co-chairs* untuk lima gugus tugas NPAP Indonesia dan mendorong mereka untuk terlibat aktif
- Menyusun desain strategi kegiatan untuk Satuan Tugas NPAP Indonesia
- Berpartisipasi sebagai salah satu panelis di webinar plastik *Blue Hope* yang diselenggarakan Pemerintah Inggris di Malaysia
- Menyusun strategi dan panduan untuk memastikan tindakan responsif gender dalam upaya menghapuskan sampah plastik.



## ■ Natural Capital Accounting for Coastal Ecosystem (NCA)

*Proyek Natural Capital Accounting for Coastal Ecosystem (NCA) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir berbasis data ilmiah, yang pada akhirnya akan mendorong agenda pembangunan berkelanjutan dan karbon biru di Indonesia.*

- Mengembangkan analisis teknis, basis data, dan risalah kebijakan terkait ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang) serta tata ruang pesisir di tingkat regional dan nasional, dengan dukungan dari Bank Dunia. Hasil studi dikonsultasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Berpartisipasi sebagai panelis dalam dialog bertema Ocean Accounts, Data and Statistics dalam kegiatan *Asia-Pacific Day of the Oceans*, yang diselenggarakan di Oktober 2020 oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*. Selain itu, WRI Indonesia bergabung dalam keanggotaan *Global Ocean Accounts Partnership*, sebuah kemitraan kolaboratif di tingkat global dalam mendukung aktivitas yang terkait dengan pengembangan neraca ekosistem pesisir.
- Mengembangkan produk pengetahuan terkait dengan pengelolaan mangrove serta jasa lingkungan ekosistem pesisir, termasuk di dalamnya ekowisata pesisir.



#### ■ Laporan dan Platform Trenlaut untuk Tren Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia

*Trenlaut adalah platform yang menyediakan informasi terkait data dan analisis pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan mendorong kolaborasi lintas mitra.*

- Berkonsultasi dengan para ahli yang adalah rekan dalam proses produksi untuk hasil akhir analisis laporan dan platform untuk tema berkaitan dengan perikanan tangkap, *aquaculture*, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan ekosistem penting di pesisir (hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang).
- WRI Indonesia mendapatkan masukan dari Forum Penasihat yang merupakan para pengambil keputusan, termasuk pejabat pemerintahan dan rekan senior dari organisasi mitra untuk hasil akhir analisis dan aspek politisnya.
- WRI Indonesia pada tahap akhir proses perbaikan dari laporan “Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A 2021 Brief”, untuk segera didesiminasikan dalam platform <http://trenlaut.id>
- Berpartisipasi dalam diskusi terkait pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan didukung analisis dan pembelajaran dari hasil laporan.
- Mengembangkan produk komunikasi untuk menyebarkan pandangan terkait pengelolaan dan kebijakan dari laporan, dalam tulisan opini berbentuk posting blog dan informasi untuk media sosial.

# KEGIATAN REGIONAL WRI INDONESIA

WRI Indonesia mendukung program pembangunan hijau oleh pemerintah daerah, yang didasarkan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan serta ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

# I. PROVINSI RIAU



## ■ Mendorong Implementasi Satu Peta di Level Tapak

- Bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) Universitas Riau, mendukung pendampingan dan penguatan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Riau, melalui penguatan kapasitas dalam pengolahan data spasial, penyusunan kebijakan dan standar, serta Peraturan Gubernur mengenai Satu Data.
- Bersama dengan BIG, mendukung pembentukan dan penguatan simpul jaringan di Kabupaten Kampar, melalui peningkatan kapasitas tim JIGD untuk pengolahan data spasial dan geportal, penguatan infrastruktur data spasial lain, serta revisi Peraturan Bupati mengenai Satu Data.
- Mendukung peningkatan kapasitas tim JIGD dalam melakukan standarisasi data spasial sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan Katalog Unsur Geografis Indonesia di Kabupaten Siak.

## ■ Pemetaan Partisipatif melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik

- Bersama PPIIG Universitas Riau, Pemerintah Kabupaten Siak, dan BIG, menyelesaikan pemetaan partisipatif melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik yang telah dimulai sejak 2019. Kegiatan ini menghasilkan peta desa dan modul pemetaan partisipatif desa.
- Bersama PPIIG Universitas Riau, mereplikasi pemetaan partisipatif melalui Kuliah Kerja Nyata untuk Kabupaten Kampar.

## ■ Transformasi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Mendukung penyusunan kebijakan dan standar penanganan konflik yang telah disahkan oleh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah.
- Bekerja sama dengan Balai Diklat Kehutanan Provinsi Riau, mendukung pengembangan sumber daya manusia kelompok kerja penanganan konflik.
- Mendukung upaya pengusulan izin Hutan Desa Tandun yang telah melalui verifikasi teknis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Isu batas wilayah dengan Kecamatan Kabun juga telah diselesaikan dengan kesepakatan bersama kedua camat.
- Mendukung berbagai peningkatan kapasitas untuk penguatan manajemen kelembagaan, penanganan konflik serta budidaya *agroforestry* di Lembaga Pengelola Hutan Desa Tandun. Hingga akhir 2020, lebih dari 40.000 batang bibit telah terkumpul di kebun bibit sebagai bentuk dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, BPDAS Indragiri Rokan dan WRI Indonesia. Sebagian bibit sudah ditanam di area demplot dan kebun petani. Pemerintah Desa Tandun telah berkomitmen untuk mendukung kegiatan *agroforestry* dan kegiatan lainnya yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) Tandun dan akan dimasukkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Desa Tandun mendatang.

## ■ Pengakuan dan Pengelolaan Berkelanjutan Wilayah (Hutan) Adat

- Mendampingi tujuh hutan adat di Kabupaten Kampar mendapatkan SK Pengakuan dari bupati, dua di antaranya telah mendapatkan izin dari KLHK. Untuk menjamin pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan, WRI Indonesia memfasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Adat (RPHA) di enam hutan adat/desa dengan pendekatan partisipatif.
- Membangun inisiatif pengembangan mata pencaharian di enam wilayah hutan adat sebagai tindak lanjut. Tiga inisiatif telah dimulai yaitu:
  - Usaha kerajinan anyaman pandan di empat desa di Kampar Kiri Hulu (Batu Sanggan, Gajah Bertalut, Aur Kuning dan Terusan). Kelompok Pengrajin Perempuan Adat (KPPA) telah terbentuk. Peningkatan kapasitas untuk pengolahan dan pembuatan produk juga telah dilakukan. Keempat kelompok telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha mikro kecil.
  - Usaha budidaya Madu Kelulut (Trigona) di Petapahan dan Kampa. Lembaga Pengelola Hutan Adat di Kampa dan kelompok perempuan di Petapahan sudah mendapatkan pelatihan budidaya. Kedua kelompok telah didaftarkan untuk memperoleh izin usaha dari dinas terkait.
  - Usaha adopsi pohon di dua desa di wilayah Kampar Kanan (Petapahan dan Kampa) dan dua desa di Wilayah Kampar Kiri Hulu (Gajah Bertalut

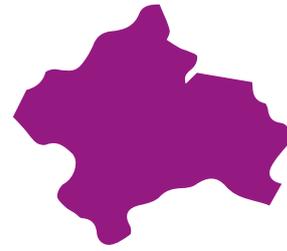
dan Terusan). Pengenalan model usaha pohon asuh dan pelatihan singkat untuk inventarisasi pohon telah dilakukan. Saat ini rata-rata 40 pohon per desa dengan kriteria khusus telah diinventarisasi di empat lokasi hutan adat.

- Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, serta mitra pendamping lokal lainnya, mendukung pengusulan pengakuan beberapa hutan adat di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Pelalawan. Hingga akhir 2020, usulan untuk Kabupaten Siak dan Bengkalis siap untuk diserahkan kepada bupati dan gubernur.

## ■ Mendorong Transformasi Pengelolaan Perkebunan Swadaya yang Berkelanjutan

- Mendampingi empat kelompok/koperasi kelapa sawit swadaya untuk memenuhi standar pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan *Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) for Independent Smallholders (ISH) Standard*. Di Kabupaten Siak, dua kelompok dampingan telah lolos audit eksternal dan merupakan dua kelompok petani sawit swadaya pertama di dunia yang berhasil memperoleh sertifikat RSPO di lahan gambut. Sementara dua kelompok di Kabupaten Rokan Hulu sedang melakukan berbagai perbaikan untuk merespons temuan-temuan audit eksternal tahap dua.

## II. PROVINSI SUMATRA SELATAN



### ■ Mendorong Implementasi Satu Peta di Level Tapak

- Mendampingi tim JIGD Provinsi Sumatra Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin dalam persiapan menuju Penghargaan Bhumandala Award 2020. Provinsi Sumatra Selatan memperoleh dua penghargaan, yakni Bhumandala Kencana dalam kategori pemanfaatan simpul jaringan terbaik, serta Bhumandala Kanaka dalam kategori simpul jaringan terbaik. Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan Bhumandala Rajata dalam kategori simpul jaringan kabupaten terbaik.
- Bersama Forum DAS Sumatra Selatan, mendukung Dinas Kehutanan dalam mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SI PAKAR HUTAN). Sistem berbasis daring ini diharapkan menjadi sebuah etalase data dan informasi yang bersumber dari wali data yang kredibel, untuk dimanfaatkan secara terbuka dan terukur guna mendukung proses-proses pemantauan, analisa, dan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten, serta personel pengendalian karhutla di tingkat tapak.

### ■ Pemetaan Partisipatif melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik

- Bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, mendukung pemetaan partisipatif batas dan potensi desa melalui Program Kuliah Kerja Nyata. Hingga akhir 2020, beberapa tahapan telah diselesaikan di antaranya: penyusunan alur kerja dan metode, peningkatan kapasitas mahasiswa terkait Sistem Informasi Geografis dan teknis Pemetaan Partisipatif Batas dan Potensi Desa (PPBPD), verifikasi segmen batas dan potensi desa, serta pendampingan pengolahan data hasil verifikasi.

### ■ Transformasi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Bersama Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan, menginisiasi pengembangan Sistem Informasi Pemetaan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (SI-PAKTHA). Hingga akhir 2020, penyusunan parameter dan variabel, metode penentuan prioritas penanganan konflik, serta pengembangan desain sistem telah dilakukan.

### ■ Mendorong Transformasi Pengelolaan Perkebunan Swadaya yang Berkelanjutan

- Memfasilitasi pengembangan platform otomatisasi tutupan lahan dan perkebunan strategis menggunakan *Google Earth Engine (GEE)*. Hingga akhir 2020, proses finalisasi dan penyempurnaan hasil pemetaan dan platform otomatisasi masih terus dilakukan.
- Mendukung pemetaan persil perkebunan/STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) di Kabupaten Musi Banyuasin, melalui penggunaan teknologi informasi, baik menggunakan E-STDB, maupun *mobile STDB*. Aplikasi *mobile STDB* telah diujicobakan di Desember 2020 dan resmi diluncurkan oleh bupati.

### ■ Pengakuan dan Pengelolaan Berkelanjutan Wilayah (Hutan) Adat dan Perhutanan Sosial

- Memfasilitasi masyarakat adat Tebat Benawa untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Adat (RPHA). Di November 2020, RPHA Mude Ayek Tebat Benawa 2021-2030 berhasil difinalisasi dan disampaikan kepada pemerintah daerah dalam sebuah lokakarya. RPHA ini telah disahkan oleh Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA), Kepala

KPH Wilayah X Dempo dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan SK Menteri LHK tentang Masyarakat Hutan Adat (MHA) dan Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa.

- Memberikan pendampingan kepada LPHA Tebat Benawa, melalui peningkatan kapasitas dalam pengelolaan administrasi dan aset kelembagaan, serta pengembangan usaha dan kewirausahaan. Selain itu, WRI Indonesia juga mendampingi LPHA untuk menyusun AD/ART serta membangun inisiatif mata pencaharian berupa:
  - Pohon asuh di Hutan Adat Tebat Benawa. Masyarakat Adat Tebat Benawa telah mendapatkan peningkatan kapasitas untuk mengidentifikasi calon pohon asuh dan melakukan pendataan mandiri untuk pohon-pohon dengan diameter lebih dari 30 sentimeter.
  - Pengembangan desa wisata di Tebat Benawa dan Rempasai. LPHA telah mendaftarkan Tebat Benawa dan Rempasai untuk program Desa Wisata

di Desember 2020. Dua orang perwakilan dari LPHA sekaligus pengurus program desa wisata telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam.

- Bersama dengan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatra Selatan, menginisiasi pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Perhutanan Sosial (SIPS). Kerangka desain sistem telah disusun dan dikonsultasikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan.

# III. PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT



## ■ Implementasi Inisiatif Satu Peta di Tingkat Tapak

- Bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat dalam implementasi percepatan kebijakan satu peta dalam pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.
- Memfasilitasi proses-proses konsultasi antara pemerintah Papua Barat, pemerintah Papua dengan BIG, BAPPENAS dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk kebijakan satu data
- Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam penyusunan kebijakan satu data.
- Mendukung pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia di PPIIG Universitas Papua dan Universitas Cendrawasih.

## ■ Pemetaan Wilayah Adat dan Transformasi Konflik

- Bersama Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Foker LSM Papua, dan Badan Registrasi Wilayah Adat, WRI Indonesia mendukung pemetaan wilayah adat Bhuyaka, Kabupaten Jayapura. Hingga 2020, pemetaan wilayah adat telah selesai dilakukan untuk 28 kampung di Kabupaten Jayapura
- Memfasilitasi tim teknis verifikasi MHA dan wilayah untuk menyelesaikan tumpang susun data spasial wilayah adat Isirawa, Kabupaten Sarmi dan proses administrasi pengusulan sebagai hutan adat. Proses ini mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Bupati Kabupaten Sarmi.

- Mendukung Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura dalam penyusunan kebijakan dan standar, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas penyelesaian konflik dan registrasi wilayah adat. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Kantor Wilayah ATR/BPN untuk mengembangkan proses registrasi dan percepatan pemetaan wilayah adat telah diterbitkan.
- Bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih, Universitas Papua, dan Universitas Ottow Geissler, mendukung inisiatif pembentukan Sekolah Tata Ruang atau kelompok peneliti muda Sistem Informasi Geospasial untuk pengembangan kualitas sumber daya pelaku pemetaan wilayah adat.
- Menyampaikan proses pembelajaran pemetaan partisipatif wilayah adat sebagai bentuk reforma agraria konteks Papua kepada Wakil Menteri ATR/BPN dan Presiden Republik Indonesia. Salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan reforma agraria di Papua adalah pemetaan sosial masyarakat adat Papua (274 suku) dan pemetaan wilayah adat.
- Mendorong pengakuan, perlindungan dan pemajuan masyarakat adat dan wilayah adat, melalui beberapa studi kebijakan wilayah adat di Papua dan Papua Barat, di antaranya:
  - Studi mengenai otonomi khusus dan hak masyarakat adat Papua atas sumber daya alam
  - Studi mengenai perempuan adat Papua dan hak-hak atas wilayah adat serta kekayaan alamnya
  - Studi kebijakan dan kelembagaan terkait pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan wilayah adat di Tanah Papua

- Bersama dengan mitra pembangunan, mendukung percepatan ketersediaan peta tematik wilayah adat di Provinsi Papua Barat melalui konsolidasi hasil pemetaan partisipatif wilayah adat dengan luas 3,7 juta hektar.
  - Bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua, mengundang peneliti muda Papua untuk berkontribusi dalam proses pendokumentasian dinamika penguasaan wilayah adat melalui kegiatan *call for essay*. Ada 26 hasil penelitian yang terkumpul dan terpilih enam penelitian terbaik. Kegiatan pendokumentasian ini menjadi *baseline* bagi WRI Indonesia untuk memahami mekanisme penyelesaian konflik wilayah adat berbasis kearifan lokal.
- **Mendorong Transformasi Pengelolaan Perkebunan Swadaya yang Berkelanjutan**
- Mendukung Dinas Perkebunan Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Jayapura untuk survei perkebunan kakao swadaya. Survei di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan di 13 kampung di distrik Gresi Selatan, Yapsi, dan Kaureh, dengan total luasan kebun mencapai 545,57 hektare. Sementara di Kabupaten Manokwari Selatan, survei telah dilakukan di enam distrik, yakni Oransbari, Ransiki, Momiwaren, Tahota, Isim dan Neney, dengan total luasan kebun mencapai 2.207,2 hektare
  - Mendukung Dinas Perkebunan Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Jayapura dalam pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas data dan informasi spasial. Survei perkebunan kakao swadaya dimaksudkan untuk menghasilkan peta tematik perkebunan rakyat, membangun suatu platform basis data yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pengelolaan lahan perkebunan yang berkelanjutan, serta memudahkan pendampingan terhadap petani swadaya.
  - Melakukan studi rantai nilai kakao di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. WRI Indonesia bekerja sama dengan lembaga Mnuukwar Papua melakukan penelusuran kakao yang dihasil dari kebun-kebun petani mulai dari pemetaan kebun petani, kakao yang dihasilkan hingga menjual. Hasil studi ini telah memberikan potret produktivitas kakao hasil kebun rakyat ini menurun karena pola bertanam dan perawatan yang kurang baik, serta dukungan pemasaran yang masih terbatas aksesnya.
- **Analisis Perizinan Perkebunan Sawit**
- Sepanjang 2020, WRI Indonesia memberikan bantuan teknis terkait analisis legal dan spasial kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan inventarisasi, analisis perizinan berbasis lahan khususnya untuk perizinan perkebunan besar kelapa sawit, serta audit kepatuhan pemegang izin. Kegiatan ini sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi. Tinjauan perizinan ini bertujuan untuk penataan, pengawasan dan pengendalian perizinan perkebunan sawit dalam mewujudkan tata kelola perizinan yang baik di Provinsi Papua. Ada delapan kabupaten yang menjadi prioritas yaitu Jayapura, Sarmi, Kerom, Boven Digoel, Merauke, Mappi dan Nabire. Hingga akhir 2020, teridentifikasi sebanyak 114 perizinan dengan komposisi 70 perusahaan sawit, 20 perusahaan non-sawit, dan 24 perusahaan perkebunan tidak teridentifikasi komoditi yang diusahakannya. Berdasarkan data ILOK teridentifikasi luasan konsesi perizinan perkebunan mencapai 1.137.323 hektare, sedangkan berdasarkan data IUP teridentifikasi mencapai 952.132 hektar, dan 306.749 hektare berdasarkan data Hak Guna Usaha (HGU).

## ■ **Lingkar Belajar Tanah Papua dan Riset**

- Telah diselenggarakan 18 Lingkar Belajar Tanah Papua (LBTP) secara daring yang diikuti oleh 1.000 partisipan. Tema-tema LBTP disesuaikan dengan kerangka kerja WRI Indonesia di Tanah Papua.
- WRI Indonesia bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan BAPPEDA Provinsi Papua menyelenggarakan riset untuk menghasilkan naskah akademik pengusulan rencana kebijakan pengembangan pendanaan lingkungan, khususnya dalam melindungi dan melestarikan hutan tropis Papua.
- WRI Indonesia terlibat dalam Penyusunan Naskah Akademik Komitmen 70 Persen Luas Daratan Provinsi Papua Barat sebagai Kawasan lindung. Riset ini merupakan implementasi perjanjian kerja sama WRI Indonesia dengan Balitbang Provinsi Papua. Tim juga berasal dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Papua, dan dinas-dinas terkait. Hingga akhir 2020, sudah dilakukan tinjauan literatur dari inisiatif yang sudah ada sebelumnya terkait dengan tema keanekaragaman hayati, spasial, ekonomi dan sosial budaya masyarakat adat Papua.

# RISET, DATA, DAN INOVASI

**WRI Indonesia mendukung penelitian yang berkualitas, berbasis bukti ilmiah, serta berperan dalam memperkuat budaya penelitian di Indonesia.**

Divisi Riset, Data, dan Inovasi (RDI) adalah salah satu bagian terpenting dari WRI Indonesia yang memastikan semua produk pengetahuan yang dihasilkan WRI Indonesia telah melewati proses penelaahan sejawat yang ketat dan melibatkan pakar internal dan eksternal dalam rangka memastikan kualitas, akurasi, koherensi kelembagaan dan mengurangi bias penelitian. Sepanjang 2020, Tim RDI WRI Indonesia telah menerbitkan sekitar sepuluh publikasi yang terdiri dari dua bab untuk buku, tiga artikel untuk jurnal internasional dan enam produk pengetahuan, di antaranya dalam bentuk studi dan catatan teknis.

■ Kegiatan Utama:

- Melaksanakan analisis kebijakan untuk tiga topik: (1) Implementasi Provinsi Berkelanjutan di Papua Barat: Studi multidisipliner; (2) Studi pustaka Pembiayaan Berkelanjutan; dan (3) *Desk study* Kesesuaian Jayapura menjadi Kota Hutan
- Melaksanakan *research roadshow* untuk meningkatkan kapasitas riset di kantor-kantor WRI Indonesia (Jakarta, Pekanbaru, Palembang, dan Manokwari). Selama ini, peningkatan kapasitas riset hanya terfokus di kantor Jakarta. Dengan memanfaatkan momentum kedatangan salah satu Direktur Sains dan Penelitian (S&R) WRI Global, kegiatan ini juga menjangkau staf WRI Indonesia di kantor regional. Terlebih lagi, kegiatan-kegiatan di daerah ini merupakan “laboratorium riset” yang dimiliki oleh WRI Indonesia, sehingga sudah sepantasnya jika staf WRI Indonesia di daerah memiliki pengetahuan terkait standar pelaksanaan riset di WRI secara umum.
- Melaksanakan seminar/ diskusi penelitian dalam rangka mempresentasikan hasil riset staf WRI Indonesia; termasuk untuk mendapatkan masukan dari S&R WRI Global dan juga dari sesama peneliti. Hal ini juga penting dilakukan untuk melakukan sinergi antar proyek, sehingga diharapkan tercipta kolaborasi baru. Sesi seperti ini diadakan enam kali dalam setahun dan mencakup beragam topik dan juga mengundang pembicara-pembicara dari luar organisasi WRI Indonesia, seperti Dr. Faisal Basri dan Prof. Budi Resosudarmo. Selain itu, peneliti-peneliti WRI juga telah mempresentasikan hasil riset mereka di beberapa konferensi, seperti *World Bank Poverty Conference*, *International Peat Congress*, dan *Indonesia Regional Science Association*.
- Lokakarya menulis Tujuan dari acara ini adalah untuk mengasah kemampuan menulis dari peneliti-peneliti WRI Indonesia. Dalam acara ini, kami mengundang beberapa fasilitator dari Universitas Indonesia yang memang telah mengeluarkan banyak publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Di akhir lokakarya workshop, peserta telah memiliki draf

manuskrip yang sudah siap untuk dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah ataupun produk pengetahuan WRI Indonesia.

□ Publikasi

- Catatan Teknis: Aplikasi Nol Emisi Indonesia (EMISI), Oktober 2020



Memaparkan metode yang digunakan dalam aplikasi EMISI untuk menghitung emisi gas rumah kaca (GRK) dan polutan udara di tingkat individual yang berasal dari kegiatan transportasi serta memaparkan penyerapan karbon yang dibutuhkan melalui reforestasi dan aforestasi.

- Kertas Kerja – Melintas Horizon: Studi Strategi Iklim Jangka Panjang untuk Masa Depan Indonesia, Maret 2020.



Memberikan gambaran awal terkait manfaat dan urgensi penetapan strategi jangka panjang (SJP) aksi iklim di Indonesia, serta menyoroti berbagai peluang yang ada saat ini untuk pengembangan strategi yang efektif.

- Tiga artikel untuk jurnal internasional:
  - *Designing the Special Pilot Economic Zone: An Alternative Approach to Revitalize Livelihoods on Peatlands*;
  - *Progress of paludiculture projects in supporting peatland ecosystem restoration in Indonesia*
  - *Risk Governance of Peatland Management in Indonesia*

# KOALISI DAN KOLABORASI



## **Accountability Framework Initiative (AFi)**

AFi merupakan wujud dari kolaborasi perusahaan dan organisasi masyarakat sipil untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas dalam rantai pasok. AFi, yang diluncurkan pada pertengahan 2019, memberikan panduan yang jelas, konsisten, dan efektif, agar terjadi peningkatan akuntabilitas dalam implementasi komitmen rantai pasok yang lebih ramah lingkungan dan ramah sosial.



## **Aliansi Konservasi Indonesia (AKSI)**

Didirikan pada tahun 2015 dengan nama Forum Komunikasi Konservasi Indonesia (FKKI) dan kini berubah menjadi Aliansi Konservasi Indonesia (AKSI), AKSI merupakan wadah diskusi 9 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan.



## **Clean Energy Investment Accelerator (CEIA) Indonesia**

CEIA Indonesia merupakan koalisi antara sektor publik dan swasta yang diinisiasi oleh Allotrope Partners, World Resources Institute, dan U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL) untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan di sektor komersial dan industri di Indonesia.



## **Food and Land Use Coalition (FOLU)**

Koalisi Pangan dan Tata Guna Lahan (FOLU) adalah inisiatif global yang berupaya untuk bekerja sama dengan para mitra guna memperbaiki sistem pangan dan tata guna lahan di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang memimpin inisiatif ini, bersama dengan Kolombia, Etiopia, Cina, India, Australia, negara-negara Nordik, dan Inggris. Di Indonesia, inisiatif FOLU dipimpin oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Empat transisi besar yang menjadi fokus koalisi FOLU di Indonesia adalah pola makan sehat, pertanian yang produktif dan regeneratif, konservasi dan restorasi alam, serta laut yang lebih sehat dan produktif.



## **Jejaring Mitra Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)**

LTKL adalah forum yang menjembatani dukungan bagi kabupaten dari jejaring mitra pembangunan nasional dan global, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan swasta dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui LTKL, arah pembangunan kabupaten didukung agar dapat menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.



## **Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Sumatra Selatan**

Pokja PPS terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan perusahaan. Pokja PPS Sumatra Selatan telah memfasilitasi pengusulan kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial (PS), memfasilitasi perizinan PS, memberi masukan mengenai rencana kerja usaha dan tanaman yang sesuai, mendukung penguatan kapasitas kelompok tani dan usaha PS, memverifikasi teknis usulan PS, serta mendukung penyelesaian konflik melalui kemitraan kehutanan.

## Konsorsium Perencanaan Restorasi Gambut Sumatra Selatan (KPRGSS)

Bersama World Agroforestry Center (ICRAF) dan Wetlands International Indonesia, WRI Indonesia tergabung dalam KPRGSS. Konsorsium ini dibentuk untuk membantu merumuskan rencana restorasi gambut di Sumatra Selatan yang berbasis sains dan sesuai dengan kondisi lapangan, serta melibatkan pemangku kepentingan setempat. KPRGSS telah menyelesaikan Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG) Provinsi Sumatra Selatan 2018-2023 serta Rencana Tindakan Tahunan (RTT) restorasi gambut tahun 2019 untuk enam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Sumatra Selatan.



## Konsorsium RESTORE+

RESTORE+ merupakan inisiatif yang diprakarsai oleh International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) dengan melibatkan World Agroforestry Center (ICRAF), WRI Indonesia, dan WWF Indonesia. RESTORE+ mengkaji pilihan kebijakan restorasi bentang lahan yang dapat sekaligus menjawab kekhawatiran terkait isu lingkungan, pangan, ketahanan energi dan penggunaan lahan berkelanjutan. RESTORE+ di Indonesia telah mengembangkan aplikasi seluler Urundata sebagai platform pengumpulan data yang dibutuhkan dalam menyusun rencana restorasi.



## Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah platform daring yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan gambut serta memantau perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta pelaku usaha di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pantau Gambut didukung oleh berbagai organisasi tingkat nasional dan regional yang tergabung dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut, yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia.



## Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI)

Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (*Low Carbon Development Indonesia/LCDI*), dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menganalisis berbagai opsi kebijakan pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Temuan analisis pembangunan rendah karbon telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan demikian, arah pembangunan Indonesia pada 2020-2024 mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



## Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut (PRIMS)

Tim PRIMS Gambut melaksanakan kegiatan *Journalism Fellowship*, berkolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Kegiatan ini menasar jurnalis di seluruh Indonesia, dan sepuluh jurnalis berhasil mendapatkan *fellowship*. Hasil dari kegiatan ini berupa 15 laporan mendalam tentang lahan gambut di enam provinsi, menggunakan data dari *platform* PRIMS Gambut. Laporan-laporan ini telah dimuat di berbagai media massa seperti Detik.com, the Jakarta Post, Mongabay Indonesia, Liputan6.com dan beberapa media lainnya.



## Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan dan Mitigasi Kabut Asap di ASEAN (SUPA)

Program SUPA, sebuah inisiatif yang didanai oleh Uni Eropa, bertujuan untuk mendukung strategi pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan di ASEAN melalui aksi kolektif dan kolaborasi aktor non-pemerintah. Sebagai langkah awal konsorsium yang terdiri dari WRI Indonesia, Tropical Rainforest Conservation & Research Center, dan Inisiatif Dagang Hijau berhasil melaksanakan rangkaian konferensi virtual bersama aktor non-pemerintah dari delapan negara Asia Tenggara.



# OPERASIONAL DAN KEUANGAN

Kepercayaan dari mitra dan para pendukung kami adalah hal yang penting bagi WRI Indonesia. Di 2020, kami menerima dana dari pemerintah luar negeri dan lembaga filantropi independen. Seratus persen dana tersebut kami alokasikan untuk secara langsung mencapai misi WRI Indonesia. Untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kami, pendapatan dan pengeluaran kami ditinjau secara berkala oleh auditor profesional. Auditor kami menetapkan bahwa WRI Indonesia mengalokasikan dana dan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai misi kami.

## Laporan Keuangan Konsolidasi

\*Tahun anggaran 2020 (1 Jan-31 Desember 2020) dibandingkan dengan tahun anggaran 2019

\*Angka dalam Rp 000.000

SUMBER DANA	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Hibah/Kontribusi	12.548	198.030
<b>Total</b>	<b>12.548</b>	<b>198.030</b>

PENGELUARAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Kegiatan Program	77.593	82.021
Administrasi	6.887	12.071
Pengembangan		
<b>Total</b>	<b>84.480</b>	<b>94.091</b>

ALAT BERSIH	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Alat bersih awal tahun	204.724	100.785
Perubahan pada Aset Operasional	-26.621	3.758
Perubahan pada Aset Terikat	-45.310	100.181
Total Perubahan pada Aset	-71.931	103.939
<b>Aset Bersih Akhir Tahun</b>	<b>132.793</b>	<b>204.724</b>

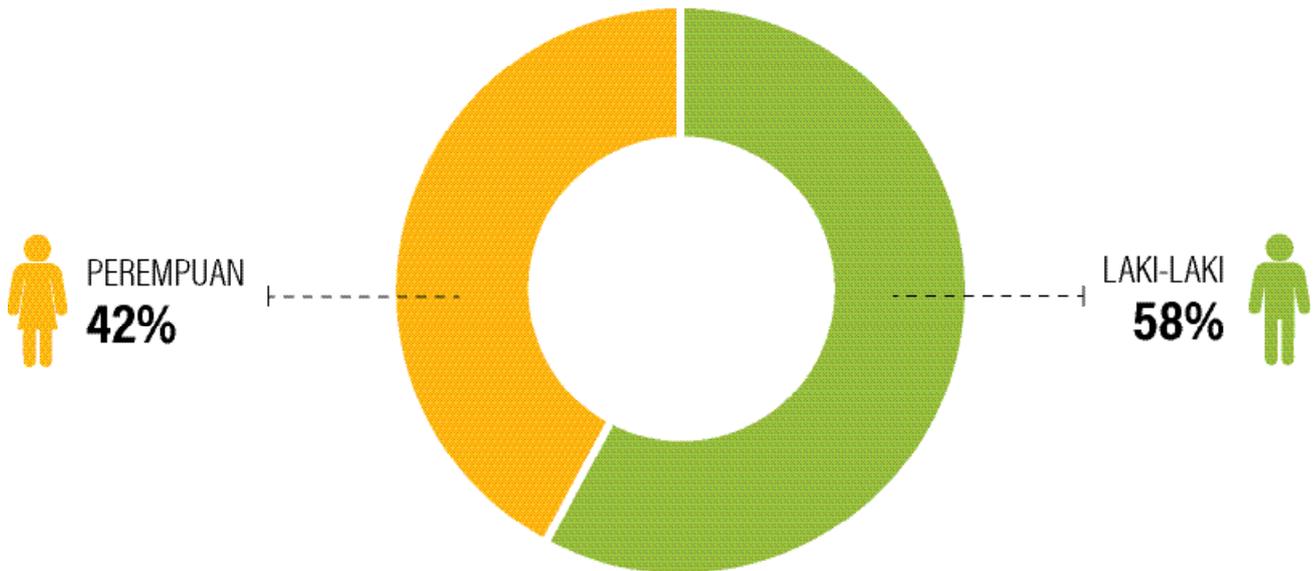
### Rincian Pendapatan dan Pengeluaran Program

PENDAPATAN	TAHUN 2020		TAHUN 2019	
Lembaga Filantropi	22%	2.773	2%	4.148
Pemerintah Luar Negeri	78%	9.726	98%	193.845
Pendapatan Lainnya	0%	49	0%	37
<b>Total Pendapatan</b>	<b>100%</b>	<b>12.548</b>	<b>100%</b>	<b>198.030</b>

PENGELUARAN	TAHUN 2020		TAHUN 2019	
Pangan, Hutan dan Air	76%	64,27	73%	69.014
Iklim	12%	10.103	9%	8.528
Energi	2%	2.110	2%	2.345
Strategi/ Administrasi	1%	682	1%	958
Kota dan Transportasi	0%	371	1%	1.176
Operasional	8%	6.887	13%	12.071
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>100%</b>	<b>84.480</b>	<b>100%</b>	<b>94.091</b>

Jumlah staf tahun 2020: **227 orang**

Dengan komposisi: Laki-laki: **132 (58%)** dan Perempuan: **95 (42%)**



# BERGABUNG DENGAN KOMUNITAS WRI INDONESIA

Jelajahi tulisan dan penelitian kami di [wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org).

Dapatkan informasi terkini melalui nawala WRI Indonesia untuk mendapatkan wawasan tentang isu terkait hutan, energi, iklim, kota, dan transportasi dari publikasi dan perangkat daring WRI. Daftarkan diri Anda di [bit.ly/NawalaWRI](http://bit.ly/NawalaWRI)



**Bergabunglah dalam percakapan  
dengan kami melalui:**

-  [instagram.com/WRIIndonesia](https://www.instagram.com/WRIIndonesia)
-  [facebook.com/WRIIndonesia](https://www.facebook.com/WRIIndonesia)
-  [twitter.com/WRIIndonesia](https://twitter.com/WRIIndonesia)
-  [flickr.com/photos/worldresourcesinstitute](https://www.flickr.com/photos/worldresourcesinstitute)
-  [linkedin.com/company/wri-indonesia](https://www.linkedin.com/company/wri-indonesia)
-  [pinterest.com/worldresources](https://www.pinterest.com/worldresources)

## KREDIT FOTO

Cover foto Kemal Jufri untuk FOLU, hal. ii Yusuf Ahmad untuk WRI Indonesia, hal.2 moto-moto/Pexels, hal.4 American Public Power Association/Unsplash, hal. 5,6 Yusuf Ahmad untuk WRI Indonesia, hal. 7 Julius Lawalata/WRI Indonesia, hal.8 James Anderson/WRI, hal.8 Eko Herwantoro/Unsplash, hal.9 Gustavo Fring/Pexels, Chuttersnap/Unsplash, hal. 10 Julius Lawalata/WRI Indonesia, hal.12 divedog/Shutterstock. magnusdeepbelow/Shutterstock, hal. 13 Wand\_Prapan/iStock, hal.14, 22 Julius Lawalata/WRI Indonesia, hal.28 Kemal Jufri untuk FOLU.





WRI INDONESIA

Wisma PMI, Lantai 7  
Jalan Wijaya I no. 63  
Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12170  
+62 21 22775816  
[wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org)